BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Negara

1. Sejarah Pengadilan Agama Negara

Pengadilan Agama Negara merupakan pengadilan tertua di Kalsel. Letak strategis Negara pada masa 4 transportasi air sangat dominan menjadikan Negara sebagai ibu kota kerajaan Banjar. Terbentuknya kerapatan Qadhi di Negara dengan adanya Stbl 1937 pada saat itu pelaksanaan sidang hanya di emperan Mesjid Jami Ibrahimi hingga jaman kemerdekaan persidangan dilaksanakan di KUA kecamatan, kerapatan Qadhi di Negara pernah diikudasi karena hanya berada di kecamatan, namun dengan adanya PERMA No 89 Tahun 1967 kerapatan qadhi di Negara dibentuk kembali, banyak para ulama yang menjadi hakim atau qadhi.

Kantor Kerapatan Qadhi/Pengadilan Agama Negara dibangun pertama kali pada Tahun 1980 diatas wakaf pemberian dari masyarakat setempat di samping Mesjid Jami Ibrahimi Desa Sungai Mandala kecamatan Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, karena sering terkena banjir maka kantor pindah menempati bekas Kantor Pengadilan Negeri pada Tahun 1988, pada Tahun 2000 Kantor Pengadilan Agama Negara pindah lagi ke jalan Negara-Kandangan km 3,5 hingga sekarang.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Negara meliputi sebagian wilayah dari seluruh kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu terdiri dari 3 wilayah kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Daha Selatan: Muning Tengah, Banjarbaru, Muning Baru, Bayanan, Pandan Sari, Tumbukan Banyu, Sungai Pinang, Habirau, Tambangan, Baruh Jaya, Samuda, Habirau Tengah, Parigi, Banua Anyar, Muning Dalam, Pihanin Raya.
- b. Kecamatan Daha Barat: Siang gantung, Baru, Tanjung Selor, Badaun, Bajayau, Bajayau Lama, Bajayau Tengah.
- c. Kecamatan Daha Utara: Sungai Garuda, Sungai Mandala, Mandala Murung, Tambak Bitin, Panggandingan, Buruh Kembang, Pekapuran Kecil, Pakan Dalam, Paramaian, Pandak Daun, Teluk Haur, Pasungkan, Teluk Labak, Hamayung, Hamayung Utara, Paharangan, Balah Paikat, Murung Raya, Hakurung.

2. Tugas dan fungsi pengadilan

a. Tugas Pengadilan

Tugas pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan istbat kesaksian hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

b. Fungsi Pengadilan

Fungsi pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama)

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Negara

Visi adalah suatu gambaran untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, visi dari Pengadilan Agama Negara mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Negara yang Agung.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar suatu organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi dari Pengadilan Agama Negara yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- 2) Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 3) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 4) Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

d. Struktur organisasi

Tabel 4.1

NAMA	JABATAN
NOFIA MUTIASARI, S.AG., M.H	KETUA PA NEGARA
ABDUL HAMID, S.HI.	WAKIL KETUA PA NEGARA
AHMAD NAFARI, S.HI.	HAKIM PA NEGARA
LISSA DEWI ANDINI, S.H.	HAKIM PA NEGARA
H. AHMAD RAMLI, S.H.	PANITERA PA NEGARA
H. ABDUL KHALIQ, S.AG	SEKRETARIS PA NEGARA

e. Ketua Pengadilan Negara dari masa ke masa

Tabel 4.2

KH. MUHAMMAD SHARAHSI (1976)
KH. HANAFIAH (1976-1980)
DRS. AZHARI ANAS (1980-1982)
DRS. SYAMSUDDIN (1982-1984)
DRS. ABD. HALIM (1984-1990)
MUCHTAR, BA (1990-1997)
DRS. ZAINI (1997-2000)
DRS. ANWAR HAMIDY (2000-2004)
DRS. H. M. GAFURI, SH, MH (2004-2008)

DRS. HJ. MASUNAH, M.HI (2008-2012)
DRS. CHAIRUL ARIFIN, MH (2012-2014)
DRS. HAFIZ, MH (2014-2016)
DRS. MUHIDDIN, MH (2016-2017)
DRS. SETIA ADIL (2017-2018)
HJ. NURUL HIKMAH, S.Ag., M.H. (2018-2021)
NOFIA MUTIASARI, S.Ag. M.H. (2021-Sekarang)

B. Penyajian Data

Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin antara suami-istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan, seseorang yang ingin bercerai secara hukum mendatangi pengadilan untuk mengurus perceraian secara resmi. Adapun disini perceraian yang terjadi di Negara pada tahun ini mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 perceraian terjadi 19 kasus dimana dalam kasus tersebut ada yang berhasil dengan pencabutan, sedangkan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 22 kasus tetapi dalam tahun ini tidak berhasil dengan pencabutan.

Laporan perkara mediasi Pengadilan Agama Negara 2020

Tabel 4.3

Tidak berhasil	Berhasil sebagian	Berhasil dengan pencabutan
13 kasus	3 kasus	3 kasus

Laporan perkara mediasi Pengadilan Agama Negara 2021

Tabel 4.4

Tidak berhasil	Berhasil sebagian
15 kasus	7 kasus

Adapun disini beberapa narasumber yang berhasil diwawancarai yaitu:

Informan 1

Nama : Nofia Mutiasari, S.Ag., MH.

NIP : 197711132007042001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama

Wawancara awal yang dilakukan penulis dengan ketua hakim Pengadilan Agama beliau berpendapat di dalam Pengadilan tentu semua orang yang datang memiliki permasalahannya masing-masing yang sudah berusaha untuk diselesaikan secara keluarga tetapi tidak memiliki titik temu, oleh sebab itu datang ke pengadilan sudah menjadi alternative untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam pengadilan tentu setiap perkara yang terjadi dilakukan mediasi yang di bantu oleh hakim meditor sebagai pihak penengah dan membantu mencari alternative untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai kesepakatan.

Menurut ketua Pengadilan Agama Negara beliau berpendapat peran mediator dalam pengadilan sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 yaitu hanya sebagai pihak penengah dalam sengketa dan tidak dapat memutuskan kehendak. Peran mediator sangatlah penting dalam sebuah mediasi sebagai pihak penengah yang bersifat netral tidak memihak di antara keduanya. Mediasi akan berjalan dengan lancar jika para pihak yang bersangkutan dapat mendengarkan arahan dari pihak mediator dengan baik.

Mediator harus mengusahakan mediasi untuk kedua belah pihak dan harus berusaha menghadirkan keduanya agar proses mediasi berjalan dengan baik, seorang mediator sangat berperan penting untuk merukunkan kembali dan mempersatukan kedua belah pihak agar tidak terjadi keretakan di dalam rumah tangga.

Saat berjalannya mediasi maka mediator harus sebisa mungkin untuk memberikan kenyamanan agar para pihak tidak merasa tertekan selanjutnya hendaknya memperhatikan karakter dan latarbelakang keluarga dari masing-masing pihak agar dapat mengetahui lebih dalam orang tersebut apakah ada yang disembunyikan atau tidak.

Mediator harus mendengarkan argumen-argumen dari masing-masing pihak, mempertanyakan sebab sebab terjadinya keretakan antara keduanya dan mediator berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian antara keduanya dengan cara mendengarkan keluh kesah, argumen para pihak lalu menguraikan permasalahan tersebut. Mediator tidak diperbolehkan untuk menghakimi hanya diperbolehkan memberikan arahan, gambaran dan

pemahaman untuk kedua belah pihak agar lebih terarah, Memberikan pemahaman bagaimana cara berumah tangga dengan baik dan memberikan saran apa saja dampak dari perceraian terhadap keluarga.

Salah satu contoh penggugat yang menggugat suaminya dikarenakan suami yang sering marah-marah, tergugat memiliki sifat temperamental yang sangat tinggi terkadang hal-hal yang kecil suka dibesar-besarkan oleh tergugat. Jika bertengkar selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar, sering membanting barang-barang disekitar dan menyuruh penggugat untuk bekerja mencari nafkah sedangkan tergugat hanya dirumah. Tergugat beralasan masih menyayangi penggugat dan ingin mempertahankan pernikahan tersebut. Peran mediator disini sangat diperlukan sebagai pihak penengah dalam biduk rumah tangga tersebut.

Mediator semaksimal mungkin agar perceraian tidak terjadi. Sebagaimana asas peradilan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan berakhirnya perkara mediasi dan berhasil maka akan mempercepat selesainya persidangan serta biaya yang dikeluarkan tidak banyak.

Tahapan pertama pemanggilan kedua belah pihak (jika pada pemanggilan pertama tidak datang maka mediasi ditunda). Pada mediasi pertama pengenalan dari mediator dan pemaparan cerita dari kedua belah pihak disini mediator memberikan saran-saran dan memerintahkan untuk para pihak berpikir kembali. Pada sidang selanjutnya mediator bertanya apakah dalam tenggang waktu yang diberikan ada perubahan pemikiran semuanya kembali kepada kedua belah pihak (jika masih ada yang harus diselesaikan

maka dilanjutkan dengan mediasi selanjutnya) mediator hanya memberikan opsi-opsi seperti tergugat yang berjanji tidak mengulangi kesalahan lagi, berjanji untuk tidak berkata kasar, dan bertanggung jawab kepada keluarga agar tercipta keluarga yang tentram. Selanjutnya semua yang disarankan oleh mediator tergantung kedua belah pihak, untuk mengikuti atau ada syarat yang lain yang ingin ditambahkan, dalam mediasi selanjutnya tergugat dan penggugat tidak menemukan titik temu dan memilih untuk melanjutkan perkara dan tidak berhasil dimediasi.

Dalam mediasi pasti banyak mengalami kendala salah satunya ekonomi, dimana salah satu pasangan yang tinggi tingkat ekonominya sangat besar sekali ego dan kemauannya merasa sangat berkuasa terkadang sangat susah untuk dinasehati. Tetapi mediator tetap berusaha mendamaikan dengan cara apapun seperti memberikan pemahaman dengan bahasa yang lebih halus dan berusaha memberi pendekatan emosional.

Rendahnya pendidikan para pihak terkadang juga menjadi kendala, kurangnya wawasan para pihak menjadikan susah mediator untuk memberikan arahan dan pemahaman. Mediator tetap berusaha dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti mereka.

Terkadang para pihak yang memiliki emosi yang sangat labil membuat mediasi semakin panas, dimana salah satunya sangat menggebu-gebu untuk bercerai sedangkan salah satunya hanya diam dan tidak mau bercerai tetap ingin melanjutkan pernikahan mereka, struktur budaya yang berbeda di tiap daerah juga menjadi salah satu kendalanya dimana beberapa orang Negara

memiliki logat yang keras, dan tempramen yang tinggi tugas mediator disini hanya bisa menasehati dengan lembut agar orang tersebut dapat mengerti dan tidak menyinggung para pihak.

Informan 2

Nama : Abdul Hamid, S.H I

NIP : 19810507200704001

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negara

Dalam wawancara selanjutnya dengan wakil ketua Pengadilan Negara beliau berpendapat menurut wakil ketua pengadilan seorang mediator hendaknya memberikan nasihat, pandangan baik dan buruknya bercerai. Memerintahkan para pihak berpikir kembali menimbang baik buruknya perceraian terhadap keluarga, efek terhadap anak dan keluarga besar. Dimediasi mediator bebas untuk mengungkapkan permasalahan mereka lebih dalam jika di dalam persidangan tidak terungkap akan terungkap pada saat mediasi.

Tujuannya untuk mencegah atau membuat mengurungkan niat bercerai. Walaupun mediasi tidak tercapai dan tetap ingin bercerai tetap akan ada kesepakatan-kesepakatan. Misalnya hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan akan ada hak-hak perempuan setelah perceraian seperti hak-hak iddah, nafkah mutah sebagian keberhasilan mediasi.

Mediator memberikan arahan setelah perceraian diharapkan tidak ada permusuhan. Mediator memberikan perbandingan-perbandingan dan contoh-contoh pasangan yang pernah bercerai yang masih adanya perselisihan,

memberikan gambaran bahwa perceraian tidak memecahkan masalah tetapi akan ada masalah baru yang lainnya, dan juga memberikan perbandingan dari tempat-tempat tugas sebelumnya walaupun ada perbandingan kultur budayanya dimasing-masing daerah.

Mediator jika mengalami masalah akan di adakan kaukus, di sana dapat menggali kembali permasalahan agar lebih terbuka dan nyaman untuk berbicara. Setiap mediasi akan terjadi masalah seperti ada salah satunya hanya mendengarkan tidak memberikan argument ataupun bantahan, ada juga yang lebih banyak ngomong, membantah mediator dan marah-marah.

Terkadang ada suami yang ingin cepat bercerai tidak ingin diadakan mediasi yang dilakukan mediator memberikan penjelasan bahwa mediasi merupakan hal yang wajib dilakukan, walaupun hanya sekali akan tetapi jika tetap tidak mau akan dibebani dengan biaya perkara bahkan biasa batal demi hukum. Maksud batal demi hukum yaitu tidak dapat diteruskan, tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan penjelasan tersebut membuat para pihak paham dan tetap menjalankan mediasi.

Menurut beliau peran mediator sudah jelas dipaparkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 yaitu hanya sebagai pihak penengah dalam sengketa dan tidak dapat memutuskan kehendak. Seorang mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak bisa membela atau menyudutkan salah satu pihak.

Mediator harus benar benar bisa memahami kondisi para pihak, oleh karena itu para mediator harus memiliki sertifikat hasil dari pelatihan tentang

mediasi guna bisa memahami lebih jauh para pihak. Sehingga bisa membantu para pihak yang mulanya ingin bercerai menjadi tidak bercerai.

Akan tetapi kembali lagi bahwasanya mediator tidak bisa memaksakan kehendak sendiri dan harus mendengarkan keputusan kedua belah pihak, setidaknya jika emmang salahsatu pihak tetap ingin bercerai. Maka mediator wajib menjelaskan dengan detail mengenai apa saja resiko resiko yang terjadi jika perceraian itu terjadi, bahwa dampaknya tidak hanya kepada diri masing masing pihak. Keluarga, anak bahkan orang terdekat pun pasti akan mengalami dampak yang besar apabila kedua belah pihak tersebut bercerai.

Informan 3

Nama : Ahmad Nafarin, S.H I

NIP : 198608192017121002

Jabatan : Hakim

Menurut beliau peran mediator sesuai denga PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosuder mediasi, mediator bersifat netral tidak boleh membedakan pemohon dan tergugat hanya boleh ditengah-tengah tidak boleh memihak salah satunya dan pada saat mediasi tidak boleh memaksa sifatnya hanya sebagai pengarah setalah mendengarkan keluh kesah mereka berdua, mediator merumuskan apa saja pokok permasalahan mereka dan mencari kesimpulan, mediator menawarkan solusi yang terbaik untuk mereka, para pihak dapat memilih mau menurut solusi tersebut atau tidak.

Peran mediator juga harus mengenali karakter para pasangan yang mau bercerai, berusaha mengharmoniskan pasangan yang mau bercerai tersebut menyamakan frekuensi keduanya agar komunikasinya berjalan dengan baik agar pasangan tersebut lebih terbuka dan di buat nyaman. Mediator mendekati dengan cara memulai pembicaraan latar belakang para pihak, agar pembicaraan tidak kaku. Perlahan lahan mediator mulai meraba permasalahan mereka dan melihat kondisi para pihak kadang ada bagian yang tidak sesuai dengan apa yang dituntut. Mediator harus fokus mengatur komunikasi keduanya.

Saat mediasi, mediator memberikan waktu untuk memberi jeda waktu mediasi agar para pihak bisa menenangkan diri terlebih dahulu karena terkadang pemikiran para pihak bisa berubah dan mediator dapat menganalisis kembali mediasi sebelumnya agar mediasi selanjutnya berjalan baik dan mendapatkan solusi terbaik. Mediator harus bisa menyesuaikan dengan bahasa sehari-hari agar mereka cepat memahami, dan memberikan kenyamanan saat ngobrol dibuat menjadi teman agar tercipta ketenangan.

Dalam mediasi kendala yang dihadapi masing-masing merasa benar, ego yang tinggi dan saling menuduh contoh masalah perselingkuan, dimana si istri menuduh suami duluan berselingkuh dan istri membalas dendam perselingkuhan tersebut sedangkan suami juga menuduh istri berselingkuh. Cara penyelesaian dengan kaukus merupakan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing pihak mendapatkan hak yang sama.

Mediator harus bersifat senetral mungkin, karena jika mediator tidak netral maka akan mengurangi rasa percaya kedua belah pihak dan mediator tidak menjalankan perannya dengan baik sehingga akhirnya masalah tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jika kepercayaan antara mediator dan kedua belah pihak sudah terjalin dengan baik maka besar kemungkinan mediasi akan berhasil

C. Analisis

Sebelum penulis menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini terkait peran mediator maka kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa kedua belah pihak, yang dimana mediator hanya membantu pertemuan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, serta mengontrol proses negosiasi dan menawarkan alternative solusi serta membantu mencari jalan keluarnya.

Setelah penulis menyajikan data hasil wawancara dengan beberapa onfrman kemudian penulis akan menganalisis hasil wawancara kepada satu pokok permasalahan sebagaimana apa yang dicari dalam penelitian ini.

Pendapat hakim tentang peran mediator dalam mendamaikan pasangan yang tidak sepakat bercerai. Semua mediator tentu menginginkan adanya keberhasilan mediasi, meskipun dalam perjalanannya tidak semua mediasi berhasil juga banyak mediasi yang tidak berhasil dikarenakan beberapa faktor. Berangkat dari hal itu, sebagaimana mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Negara pun tidak semuanya berhasil juga ada yang tidak berhasil.

Salah satunya perkara dengan nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Negr yang mana hanya salah satu pasangan yang ingin bercerai dan satunya tidak yang akhirnya mediasi pun berujung tidak berhasil atau gagal.

Menurut hukum Islam berdasarkan HR. Abu Dawud yaitu:¹

الطلاق تَعَالَى اللهُ لِي الْحَلَالِ بِغَضٍ

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)”

Sejalan dengan itu jika ada kasus perceraian di Pengadilan Agama akan diupayakan dengan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator guna menghindari terjadinya perceraian anantara kedua belah pihak.

Garry Goopaster berpendapat bahwa mediasi merupakan suatu proses negosiasi pemecahan masalah dimana para pihak luar tidak memihak (*Imparsial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari cara menyelesaikan sengketa tersebut.²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari

¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2 (Beirut: Daar al-Kutub, 1996), 1863.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Nasional*, 1-5.

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksa sebuah penyelesaian.

Sejalan dengan hal itu adapun yang dijelaskan oleh ketua Pengadilan Agama Negara peran mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yaitu hanya sebagai pihak penengah dalam sengketa dan tidak dapat memutuskan kehendak. Peran mediator sangatlah penting dalam sebuah mediasi sebagai pihak penengah yang bersifat netral tidak memihak di antara keduanya.

Pendapat ketua Pengadilan Agama Negara sejalan dengan teori mediasi bahwa mediasi merupakan cara untuk mencari jalan keluar atau solusi dari suatu permasalahan yang terjadi guna mendapatkan hasil yang mufakat dan tidak merugikan siapapun.

Wakil ketua Pengadilan Agama Negara juga menyatakan bahwa seorang mediator hendaknya memberikan nasihat, pandangan baik dan buruknya sebuah perceraian. Memerintahkan para pihak untuk berpikir kembali menimbang baik buruknya perceraian terhadap keluarga, efek terhadap anak dan keluarga besar.

Sejalan dengan hal itu seorang mediator dalam menjelaskan perannya, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana pilihan para pihak, hanya berperan sebagai penengah dan membantu menemukan solusi yang terbaik sehingga bisa menghasilkan win win solution.

Sebagaimana hakim mediator yang menangani langsung perkara ini yaitu Bapa Naparin memaparkan bahwa seorang mediator harus mengenali karakter para pasangan yang mau bercerai, berusaha mengharmoniskan pasangan yang mau bercerai tersebut menyamakan frekuensi keduanya agar komunikasinya

berjalan dengan baik agar pasangan tersebut lebih terbuka dan di buat nyaman. Mediator mendekati dengan cara memulai pembicaraan latar belakang para pihak, agar pembicaraan tidak kaku. Perlahan lahan mediator mulai meraba permasalahan mereka dan melihat kondisi para pihak kadang ada bagian yang tidak sesuai dengan apa yang dituntut. Mediator harus fokus mengatur komunikasi keduanya.

Mediator hanya menjalankan perannya sebaik mungkin, sesuai permasalahan yang terjadi dan harus benar benar memahami kondisi. Bukan hanya kondisi permasalahan terjadinya sebuah perceraian melainkan juga kondisi dari kedua belah pihak dan latar belakangnya agar memudahkan mediator menemukan suatu solusi untuk para pihak walau hasil akhir kembali lagi kepada para pihak.

Kemudian berdasarkan dari hasil wawancara bersama responden mengenai kasus perceraian yang mana ketika dilakukan mediasi oleh mediator, Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat walaupun sudah dilakukan mediasi.

Mediator sendiri telah melakukannya perannya sebaik mungkin guna membantu para pihak agar tidak terjadinya perceraian dan hubungan keluarganya kembalikan sakinah, mawaddah dan warohmah. Akan tetapi keputusan akhir tetap di tangan para pihak, yang mana Penggugat tetap bulat pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat walaupun sudah dijelaskan oleh mediator apa saja dampak dan resiko jika perceraian dilaksanakan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada sidang pertama gugata

perceraian hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Proses perdamaian tersebut dilakukan dengan adanya mediasi yang dilaksanakan oleh mediator dan para pihak.

Sebagaimana yang diketahui perceraian memang hal yang diperbolehkan, namun semaksimal mungkin harus dihindari guna kemaslahatan para pihak. Oleh karena itu peran mediator sangatlah penting dalam sebuah mediasi.

Sejalan dengan hal itu baik hakim di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Umum harus mencegah perkara perceraian dan berusaha lebih keras untuk mempertahankan rumah tangga para pihak yang sedang ditombak kehancuran. Tidak hanya sekedar mempertemukan kedua belah pihak lalu langsung mengabulkan atau menolak kasus perceraian tersebut. Namun dilaksanakan pertemuan dan dibantu mencari solusi untuk kebaikan kedua belah pihak. Dimana seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Sejalan dengan ayat tersebut maka agar tidak ada persengketaan yang terus berlanjut di antara kedua belah pihak maka sebaiknya dikirim seorang hakim agar menjadi pihak penengah agar terjadinya perbaikan tidak ada kerusakan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib

mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak melakukan mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 17 kewajiban Hakim pemeriksa perkara adalah sidang yang ditentukan harus dihadiri oleh para pihak, lalu hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu.

Selanjutnya kehadiran para pihak berupa panggilan yang sah dan patut atau dengan kata lain panggilan yang resmi langsung dari Pengadilan Agama. Apabila salah satu pihak tidak berhadir pada sidang pertama maka tindakan selanjutnya yaitu melakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

Apabila para pihak ternyata lebih dari satu maka mediasi tetap akan diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak semua pihak berhadir pada mediasi tersebut. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak akan menghalangi pelaksanaan mediasi yang akan berjalan.

Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak secara jelas. Mengenai pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berakibat hukum

atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan serta kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

Selanjutnya hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud sebelumnya harus ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara. Selanjutnya keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud sebelumnya wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Tahapan saat mediasi berlangsung, mediator mempertemukan kedua belah pihak dan harus menghadirkan keduanya agar mediasi bisa berjalan dengan baik lalu membuka mediasi dengan menayankan suasana atau kondisi kedua belah pihak.

Ketika mediasi sudah berjalan mediator harus menjelaskan tugasnya yang mana hanya sebagai pihak ketiga guna berjalannya mediasi dalam kasus

perceraian ini. Mediator dilarang memihak salah satu dari para pihak. Mediator juga tidak memiliki kewenangan atau hak khusus untuk menentukan keputusan para pihak didalam permasalahan dan mediator harus benar benar menjaga rahasia masing-masing pihak dan apapun yang didengar selama proses mediasi.

Mediator harus memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mengutarakan atau menyampaikan apa yang ada di hati dan pikirannya tentang permasalahan yang dialami kedua belah pihak dan mediator harus benar benar memahami kondisi para pihak. Mediator juga harus bisa mengontrol emosinya agara tidak terbawa suasana para pihak yang sudah sangat pasti keadaan emosinya tidak stabil saat mediasi.

Setelah memahami permasalahan yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga para pihak sehingga ingin bercerai, mediator harus memberikan solusi atau saran kepada para pihak agar tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan tata bahasa serta penyampaian yang baik agar mudah dipahami oleh para pihak.

Selanjutnya menjelaskan apa saja dampak-dampak yang akan terjadi ketika perceraian tersebut terjadi terlebih apabila para pihak telah mempunyai anak, maka kehidupan anak tersebut pun harus dipertimbangkan bagaimana selanjutnya jika orang tuanyaharus bercerai. Setelah memberikan solusi kepada para pihak yang akan bercerai namun sipengugat tetap ingin bercerai, maka mediator memberikan kesempatan selama kurang lebih 2 minggu kepada yang tergugat untuk memperbaiki kembali hubungannya.

Tergugat disarankan agar memperbaiki perilakunya dan meminta maaf ke istrinya, serta melakukan hal hal yang kiranya bisa membuat istrinya tidak marah lagi kepadanya. Setelah 2 minggu maka diadakan kembali proses mediasi, maka usaha serta perubahan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat guna memperbaiki bahtera rumah tangganya harus dipertimbangkan oleh Penggugat.

Akan tetapi penggugat tetap ingin bercerai maka mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan tidak bisa memaksa penggugat untuk tidak bercerai dikarenakan seorang mediator harus bersifat netral tidak memihak siapapun dan kasus berlanjut kepersidangan. Meskipun mediasi tidak tercapai dan perceraian tetap terjadi, mediator tetap harus menjelaskan bahwa ada hak-hak perempuan setelah perceraian seperti hak-hak iddah dan nafkah mut'ah.

Berdasarkan dari data yang diperoleh oleh penulis bahwa tidak semua kasus perceraian mediasinya dinyatakan gagal. Pada tabel 4.3 di Tahun 2020 ada 3 kasus perceraian yang berhasil dicabut dan pada tabel 4.4 di Tahun 2021 ada 7 kasus perceraian yang perkaranya pun juga dicabut karenanya keberhasilan mediasi tersebut. Artinya jika dilihat dari hal tersebut hakim sudah berupaya semaksimal mungkin sehingga dalam beberapa perkara dapat diselesaikan melalui proses mediasi.

Pada dasarnya mediasi dinyatakan berhasil apabila bisa menghasilkan win-win solution, yang dengan solusi tersebut maka perceraian tidak jadi dilaksanakan. Namun apabila win-win solution tidak terjadi maka mediasi dianggap gagal. Akan tetapi mediator sudah semaksimal mungkin melaksanakan

peran serta kewajibannya dan tidak melanggar perannya yaitu memihak salah satu pihak dan tetap bersifat netral.

Sebagaimana yang disebut diatas penulis berkesimpulan bahwa peran mediator menghadapi salah satu pasangan tidak mau bercerai sesuai dengan kewenangan dan tugas mediator dalam mediasi mediator bertugas merubah pandangan egosentris masing-masing menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Agar menghilangkan ego masing-masing dan saling memahami antara kedua belah pihak.

Dari pemaparan diatas peran mediator sudah sesuai dengan peran penentu dalam mediasi dimana peran tersebut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Memberikan masukan bahwa sengketa bukan menang atau kalah tetapi untuk diselesaikan
- d. Memberikan alternative untuk memecahkan masalah
- e. Membantu menyelesaikan masalah, serta membujuk para pihak untuk menerima masukan dalam menyelesaikan masalah.

Dimasukkannya mediasi dalam proses persidangan bukan berarti tanpa alasan yang kuat. Sebagai bentuk lain dari penyelesaian sengketa, mediasi mempunyai sisi keunggulan yaitu mencapai kesepakatan perdamaian, menempatkan kedua belah pihak di tempat yang sama. Prosesnya cepat, sederhana, berbiaya rendah dan bersifat informal. Masing masing pihak berupaya

menyelesaikan masalah sendiri, tidak diperlukan alat bukti, hasil yang diharapkan adalah solusi yang sama-sama menguntungkan.

Mediasi merupakan hal yang sangat penting sebagai mediator untuk menengahi perkara perselisihan dan berperan untuk mendamaikan atau menengahi perkara perceraian, sehingga suami istri mengurungkan niatnya untuk bercerai, meski keputusan akhir itu diserahkan kepada suami istri, untuk bercerai atau meneruskan perkawinannya

Akan tetapi mediasi pastinya juga memiliki beberapa kekurangan:

- 1) Mediasi hanya dapat dilakukan secara efektif apabila para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi;
- 2) Prosedur mediasi dijadikan bahan untuk penundaan penyelesaian perselisihan bagi pihak yang tidak beriktikad baik.
- 3) Kasus-kasus tertentu ada kemungkinan tidak dapat dimediasi, terutama berkaitan dengan ideologi dan nilai-nilai dasar, yang tidak memberikan ruang bagi para pihak untuk berkompromi;
- 4) Jika masalah utama dari perselisihan adalah penentuan hak, maka mediasi dianggap tidak tepat, karena perselisihan hak harus diputuskan oleh hakim, dan mediasi lebih cocok untuk menyelesaikan perselisihan yang ada kaitannya dengan kepentingan;
- 5) Dalam tataran normatif, mediasi tentu hanya dilakukan di bidang hukum privat, bukan di bidang hukum pidana.

Pada lingkungan peradilan agama, mediasi cenderung digunakan untuk menekan angka perkara perceraian. Hal ini juga tidak terkecuali di lingkungan Pengadilan Agama Negara yang mana angka perceraian pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Berdasar data yang diperoleh pada Tahun 2020 perceraian terjadi 19 kasus dimana dalam kasus tersebut ada yang berhasil dengan pencabutan, sedangkan untuk Tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 22 kasus tetapi dalam tahun ini tidak berhasil dengan pencabutan. Dibalik minimnya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Negara tersebut, ternyata memiliki beberapa kendala, salah satu kasusnya yaitu salah satu pasangan yang tidak mau bercerai.

Sejalan dengan teori kewenangan dan tugas mediator dalam mediasi, maka saat proses mediasi berlangsung kedua belah pihak harus berhadir agar mediator bisa melakukan mediasi. Akan tetapi kendala yang dihadapi mediator yaitu salah satu pihak tidak berhadir.

Selanjutnya sesuai teori tata cara pelaksanaan mediasi di pengadilan pihak yang berperkara apabila tidak menghadiri sidang maka harus dilakukan panggilan ulang secara patut dan sah. Para pihak wajib berhadir saat proses mediasi, jika saat mediasi tidak hadir maka mediasi akan ditunda dan apabila dipanggil 2 kali berturut-turut tidak berhadir tanpa alasan maka proses mediasi dianggap telah gagal.

Cara penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Negara apabila salah satu pihak tidak hadir maka prosesnya ditunda terlebih dahulu sampai pihak yang tidak hadir datang kembali untuk mengikuti proses mediasi karena hakim

sangat sulit menemukan jalan keluar masalah jika salah satu pihak tidak hadir sehingga diharapkan dapat tercapai suatu kesepakatan bersama dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Ketika mediasi berjalan, mediator harus menjelaskan tugasnya di dalam mediasi bahwa hanya sebagai penengah dari para pihak dan tidak memihak siapapun tapi membantu mencari solusi. Sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi, seorang mediator harus menjaga dengan benar kerahasiaan selama mediasi berlangsung dan juga mediator harus menjalankan prinsip netralitas serta prinsip solusi yang unik guna mempertahankan rumah tangga para pihak.

Kendala yang dihadapi mediator saat proses mediasi menurut ialah sikap para pihak yang terlalu emosional sehingga mediator harus benar benar menjaga emosinya agar suasana tidak semakin buruk. Dikarenakan minimnya pengetahuan para pihak mengenai peran mediator dan terkadang para pihak menganggap mediator tidak perlu mencampuri urusan mereka dikarenakan sudah bulatnya keputusan mereka untuk bercerai dan siap menanggung semua resiko yang akan dihadapi kedepannya.

Oleh karena itulah saat mediasi seorang mediator harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada para pihak untuk mendapatkan kepercayaan para pihak sehingga mediasi berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

Selanjutnya kendala yang dihadapi mediator yaitu dimana salah satu pihak merasa berpenghasilan sendiri dan mampu mencukupi kebutuhannya dan anak anaknya sehingga tidak takut akan perceraian. Serta faktor psikologis yang mana

penderitaan yang sudah berlangsung lama dan terus menerus sehingga sudah bulat keputusannya untuk bercerai.

Sejalan dengan itu mediator sangat berperan untuk menjelaskan dan membantu para pihak bahwa ketika terjadinya suatu perceraian bukan hanya perkara nafkah anak tersanggupi atau tidak. Akan tetapi mengenai psikologis anak juga harus dipertimbangkan bagaimana jika ia melihat kedu orang tuanya berpisah.

Oleh karena itu mediator memutuskan untuk melanjutkan kembali mediasi nantinya dan menyuruh salah satu pihak untuk merubah sikapnya dan melakukan yang terbaik guna mempertahankan rumah tangganya, karena salah satu pihak menyatakan tidak ingin bercerai dan masih amat sangat mencintai pasangannya.

Setelah pertemuan berikutnya ternyata pihak yang menggugat tetap pada keputusannya bahwa ia ingin bercerai walaupun pihak satunya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berubah. Namun nasi telah menjadi bubur, apa yang telah terjadi selama ini sudah sangat melukai hatinya sehingga tetap ingin bercerai.

Kendala berikutnya yang dihadapi mediator juga karena adanya campur tangan keluarga dengan pengaruh yang sangat besar mendukung para pihak untuk berpisah. Karena hal itulah seorang mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong terjadinya perdamaian.

Kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Diperlukan pula ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para

pihak dan kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalah dengan baik dan damai.

Oleh karena itulah Mahkamah Agung RI mengadakan pelatihan untuk setiap mediator dan mediator yang telah melaksanakan pelatihan pasti akan mendapatkan sertifikat. Dari pelatihan tersebutlah mengembangkan kemampuan-kemampuan para mediator guna menjalankan mediasi lebih mudah dan memahami para pihak dengan baik.

Kesadaran masyarakat dalam mediasi juga sangat diperlukan terlebih lagi mengingat keuntungan dari mediasi. Namun dalam praktiknya masih kurang sadarnya masyarakat atau para pihak yang bersengketa untuk sungguh-sungguh melakukan mediasi, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa kegunaan dari mediasi.

Akan tetapi ketika masyarakat sudah mengetahui pun masih ada saja masyarakat yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan mediasi. Padahal dalam peraturan sudah jelas bahwa dalam melakukan mediasi wajib memiliki itikad baik.

Tentang kendala yang dihadapi oleh mediator yaitu tidak adanya itikad baik dari para pelaku, mediator tidak perlu khawatir dikarenakan didalam PERMA No 1 Tahun 2016 telah mengatur tentang para pihak harus beritikad baik terdapat dalam pasal 7 dan ada juga akibat hukumnya apabila para pihak tidak beritikad baik yaitu Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Apabila penggugat tidak beritikad baik maka gugatan perceraian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pihak tergugat

yang tidak beritikad baik maka biaya ditanggung oleh tergugat. Tidak adanya itikad baik dari para pihak inilah yang terkadang juga menjadi penghambat mediator guna keberhasilan proses mediasi karena keinginannya yang sudah sangat tinggi ingin bercerai.